

SENATOR



ISSN 2978 - 3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 DESEMBER 2024

■ **Varia Senat**

**Keterbatasan SDM Jadi Masalah
Tata Kelola Pemerintahan Desa**

■ **Sekretariat Jenderal**

**Pegawai Setjen DPD RI Ikuti
Bimtek Jurnalistik**

■ **Gagasan**

**Atensi dan Inisiasi DPD RI
Dalam Mendorong
Lahirnya UU Pengelolaan
Perubahan Iklim**

■ **Wisata**

**Empat 'Surga' Tersembunyi
di Banda Naira
Four 'Hidden Paradises'
in Banda Naira**



DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi *Online*

**Sultan Ajak Pemuda
Membangun Daerah**

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi *Online*
- Bank Harus Ikut Perang Melawan Judi *Online*
- Judi *Online* Bertentangan dengan Pancasila

NUSANTARA

10

- Sultan Ajak Pemuda Membangun Daerah
- *Fun Walk Green Democracy* Sebagai Wujud Kepedulian untuk Lingkungan
- 40 Kecamatan di Sumut Belum Memiliki Sekolah
- Integrasikan Transmigrasi dengan Program *Food Estate*
- Momen Peringatan HGN 2024 Tingkatkan Kesejahteraan Guru
- GKR Hemas Ajak Media Awasi Kinerja DPD RI
- DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Wartawan



VARIA SENAT

20

- Keterbatasan SDM Jadi Masalah Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Banyak BUMDes Mati Suri
- Pengawasan UU Pangan, Komite II Kunker ke DIY
- Penjabat Gubernur Lampung Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI

SEKRETARIAT JENDERAL

25

- Pegawai Setjen DPD RI Ikuti Bimtek Jurnalistik

GALERI FOTO

26



GAGASAN

27

- *Atensi dan Inisiasi DPD RI Dalam Mendorong Lahirnya UU Pengelolaan Perubahan Iklim*

KULINER

30

- Empat 'Surga' 'Tersembunyi' di Banda Naira
Four 'Hidden Paradises' in Banda Naira





Pemberantasan Judol Jangan Setengah Hati

DPD RI kembali mengusung tema soal judi *online* yang kian marak. Maraknya perjudian *online* ini di Indonesia menunjukkan bahwa judi *online* atau "judol" telah berkembang menjadi jaringan besar yang merugikan. Upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah sejauh ini terkesan setengah hati dan tidak menyeluruh, padahal judol tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak tatanan sosial dan generasi muda bangsa. Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa judol adalah masalah serius yang membutuhkan tindakan tegas dan komprehensif.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin telah menunjukkan komitmennya dengan mendukung pembentukan panitia khusus untuk menelusuri dan membongkar jaringan judol ini sampai ke akar-akarnya. Langkah ini perlu didukung dengan kebijakan yang lebih keras dan spesifik, seperti penegakan hukum yang lebih tegas terhadap seluruh lapisan jaringan judol, mulai dari pelaku kecil hingga aktor utama. Sektor perbankan pun harus diwajibkan untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat dalam pembukaan rekening baru dan transaksi keuangan, guna mencegah peredaran dana ilegal.

Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan *payment gateway* untuk membatasi akses serta transaksi yang berkaitan dengan judol. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga harus ditingkatkan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya judol. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama antar lembaga, diharapkan bisa memutus rantai judol di Indonesia dan memulihkan integritas sosial ekonomi masyarakat. **(* / Pemred)**

Eradicating Online Gambling Not To Be Done Half-Heartedly

DPD RI revisits online gambling theme which is getting more and more rampant. The rampancy of the online gambling a.k.a "judol" in Indonesia indicates that it has grown into a harmful huge network. The eradication attempt executed by the government so far seemingly looks half-hearted and uncomprehensive, whereas judol is not only causing harm financially but also spoiling social order and the nation's young generation. It is imperative that all parties involved comprehend that judol is a serious problem that needs firm and comprehensive measure.

The Chairman of DPD RI, Sultan B Najamudin, has expressed his commitment by endorsing the forming of special task force to investigate and expose the judol network right to its roots. The step should be supported by a stronger and more specific policy, such as a sterner law enforcement against all levels of judol's networks, beginning from minor operators right up to the main actors. Banking sector must be obliged to exert a tighter monitoring toward new account openings and financial transactions in order to block illegal fund flows.

In addition to that, the government should cooperate with internet providers and payment gateway services to limit the access to financial transactions related to judol. Education and awareness campaign should likewise be intensified to awaken the community awareness about the harmfulness of judol. Through comprehensive approach and inter-coordination among institutions, it is expected to be able to break the chain of judol in Indonesia and produce recovery to the integrity of the community's social economy.

(* / Chief Editor)

DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi *Online*



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjawab pertanyaan wartawan usai pengukuhan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). (Foto Senator)

Permainan judi *online* atau judol semakin marak terjadi belakangan ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Para petinggi di negeri ini pun telah banyak menyatakan keprihatinannya dengan maraknya judol tersebut, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin dan senator lainnya.

Sultan menyebut, judol bukan masalah kecil. Judol telah berkembang menjadi suatu jaringan bisnis besar yang melibatkan ribuan rekening, ratusan juta transaksi, dan perputaran dana hingga ribuan triliun rupiah. Judol ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak generasi bangsa.



(Foto ilustrasi : Ist)

Penting tindakan tegas dan menyeluruh dalam pemberantasan judi *online* yang semakin marak dan merugikan masyarakat ini. “Kami di DPD RI mendukung penuh upaya pembersihan menyeluruh, tidak pandang bulu, untuk mengatasi fenomena yang merugikan ini. Bahkan, DPD RI siap membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas seluruh jaringan judol hingga ke akar-akarnya,” tegas Sultan di DPD RI, Jumat (15/11/2024).

Dalam pandangan Sultan, pemberantasan judol harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya. Mulai dari *payment gateway*, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran. Semua pihak yang turut andil dalam perputaran dana besar di kasus judol harus diusut hingga tuntas agar tidak hanya pelaku di tingkat kecil saja, tetapi aktor-aktor utama yang lebih menikmati keuntungan di atas kerugian masyarakat.

Ketua DPD RI ini juga

“ Kami sepakat bahwa pembersihan ini harus menyeluruh, dari hilir ke hulu. Jangan sampai isu ini hanya dilihat sebagai kasus kecil. Negara membutuhkan anggaran yang besar untuk program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti Program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan energi. Ini saatnya kita fokus untuk membersihkan sistem dari aktivitas bisnis ilegal yang merugikan.

”
Sultan

mendukung penuh seruan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di berbagai sektor. Upaya ini harus menjadi bagian dari transisi menuju Indonesia Emas 2045 dengan melibatkan semua pihak agar berjalan dengan transparan dan

bertanggung jawab. Bahkan, jika diperlukan, DPD RI siap menggunakan hak konstitusionalnya dalam pengawasan dengan membentuk Pansus Judi *Online*, untuk memastikan pembersihan ini benar-benar berjalan efektif.

Menurutnya, judi *online* membuat banyak masyarakat yang terjatuh dalam ilusi keberuntungan, namun akhirnya hanya menjadi korban dalam permainan yang merugikan. Masyarakat perlu dilindungi dari aktivitas ilegal ini yang memanfaatkan mereka demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

“Kita perlu mengembalikannya *fee base* hasil dari bisnis ini ke negara untuk membiayai program-program pembangunan dengan masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Kita harus tetap percaya aparat penegak hukum dapat bergerak cepat. Jangan sampai peristiwa ini hanya menjadi kasus hukum kecil tanpa menyentuh *layer-layer* besar di baliknya,” tegas Sultan. (*)



Bank Harus Ikut Perang Melawan Judi *Online*

Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan judi *online* telah menjadi salah satu prioritas nasional. Karena itu, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, menyerukan dukungan perbankan dalam upaya pemerintah untuk memberantas judi *online* (judol).

“Perbankan memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai keuangan yang menopang keberlangsungan judi *online*.

Karena itu, bank, terutama yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), sebagai bagian dari pemerintah, harus menunjukkan kontribusi nyata dalam upaya ini,” ujar Senator Ahmad Nawardi.

Perbankan perlu menerapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pemberantasan judi *online*. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah memblokir seluruh rekening yang terbukti atau dicurigai terlibat dalam aktivitas judi *online*. Pemutusan aliran dana ini merupakan langkah strategis untuk melemahkan operasional pelaku judi *online*.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor

Jasa Keuangan (POJK APU-PPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi, termasuk pengendalian terhadap aktivitas mencurigakan.

“Langkah ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengharuskan lembaga keuangan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan,” jelas senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Selain itu, bank juga harus memperketat prosedur verifikasi nasabah, khususnya bagi calon nasabah baru, untuk mencegah pembukaan rekening yang berpotensi digunakan oleh bandar atau pelaku judol.

Implementasi teknologi analitik risiko serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

“
Bank harus memperketat prosedur verifikasi nasabah, khususnya bagi calon nasabah baru, untuk mencegah pembukaan rekening yang berpotensi digunakan oleh bandar atau pelaku judol.
”

Ahmad Nawardi.

Ahmad Nawardi
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

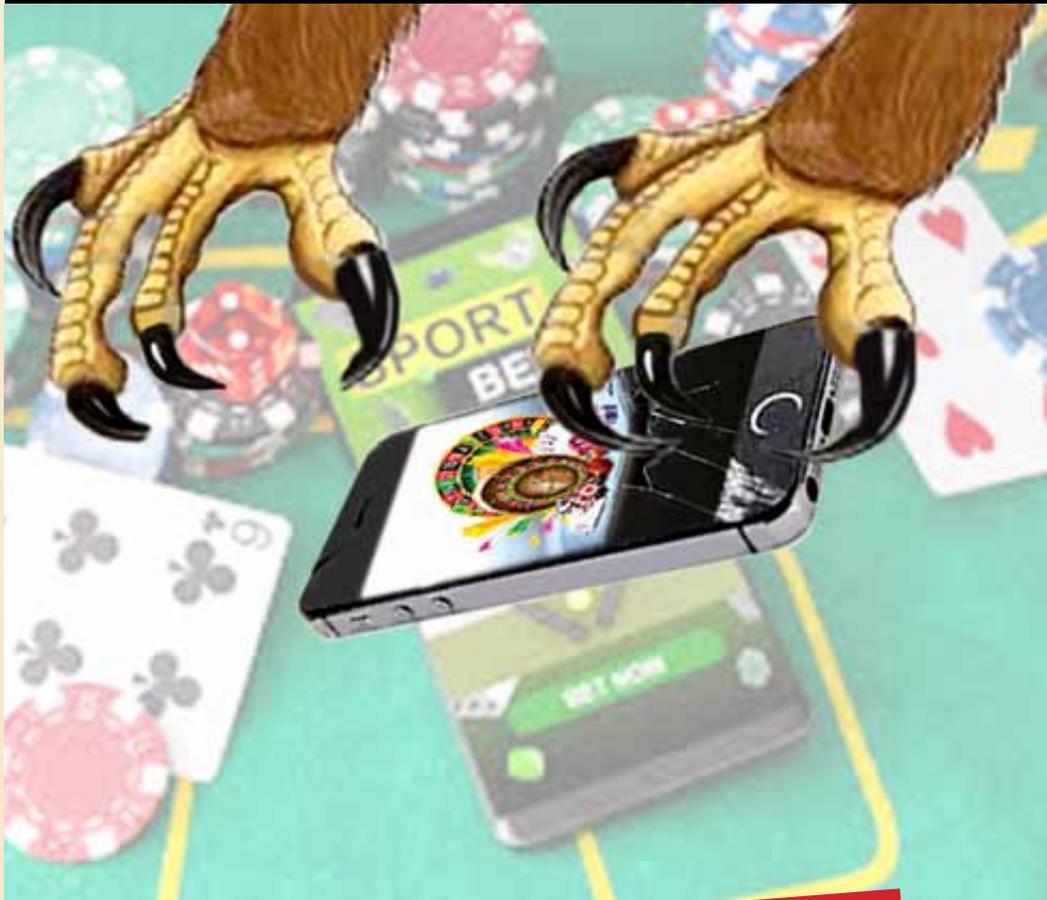


Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam ekosistem keuangan. Ketentuan ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan sistem deteksi dini terhadap aktivitas ilegal, termasuk judi *online*.

Pemberantasan judol adalah perjuangan bersama demi menciptakan masyarakat yang lebih aman, bersih, dan bermartabat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya ini. Bank, sebagai penjaga sistem keuangan, memiliki peran strategis dalam mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan keadilan dan melindungi generasi bangsa.

“Tanpa peran aktif bank, perang melawan judi *online* hanya akan menysar pelaku kecil di lapangan, sementara sindikat besar tetap berkembang. Ini seperti mengalahkan ‘kroco-kroco’ tanpa memberantas kanker dan virus yang merusak dari dalam. Sebagai bagian dari pemerintah, HIMBARA diharapkan mengambil langkah lebih besar dalam mendukung pemberantasan judi *online*,” katanya. (*)

Judi *Online* Bertentangan dengan Pancasila



Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus (DK) Jakarta, Fahira Idris, menegaskan bahwa judi *online* (judol) tidak hanya merusak moral individu tetapi juga menciptakan ancaman besar bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum negara. Selain itu, judol bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama karena mengabaikan norma agama yang melarang praktik tersebut.



Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, persatuan nasional, dan keberagaman, pemberantasan judi *online* menjadi langkah konkret. “Sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk membebaskan Indonesia dari ancaman judi *online* dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat,” kata Fahira, Selasa (26/11/2024).

Selain itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga dilanggar, karena judi *online* sering kali menjerumuskan masyarakat ke dalam eksploitasi ekonomi dan degradasi moral. Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas sosial dan integritas wilayahnya

dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal).

Stabilitas sosial adalah fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Gangguan terhadap stabilitas sosial, dalam hal ini judi *online*, dapat melemahkan persatuan dan solidaritas nasional. “Dengan memberantas judi *online*, pemerintah memperkuat integritas NKRI, melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan, dan mencegah aktivitas ilegal yang merugikan bangsa secara keseluruhan,” kata Fahira.

Kerugian Negara

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri, mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi

dan Digital (Komdigi) bersama para penegak hukum dalam memerangi atau memberantas judi *online*.

Saat ini negara sangat serius berkolaborasi memberantas judi *online* dengan memecat dan menangkap dan menindak secara hukum beberapa pegawai yang terlibat. Hasan Basri mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kemenkomdigi, yang tidak pandang bulu dalam memberantas judi *online*.

“Kami berharap langkah ini tidak hanya dilakukan awal-awal saja. Sebab, kejahatan judi *online* sangat berdampak negatif yang terus berkelanjutan. Sanksi yang keras kepada semua pihak yang terlibat, untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat judi *online*, dan untuk menyelamatkan masyarakat kita,” ujarnya, Minggu (10/11/2024). (*)



Fahira Idris

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Hasan Basri

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ANTARA

Program pemulihan bagi pecandu judi online

Bermain judi *online* bisa menyebabkan kecanduan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Kecanduan tersebut dapat dipulihkan melalui beragam program berikut, sesuai dengan kondisi pecandu judi *online*.

Jenis program untuk pemulihan



Terapi perilaku kognitif (CBT)

Terapi memodifikasi perilaku agar berhenti berjudi.



Terapi kelompok

Berkumpul dengan sesama pecandu yang ingin berubah.



Konseling keluarga

Terapi bagi keluarga guna membantu penderita yang kecanduan judi *online* agar berhenti.



Motivational interviewing (MI)

Terapi yang fokus untuk menumbuhkan keinginan dan komitmen untuk berubah.



Perawatan inap

Terapi untuk orang yang kecanduan judi *online* tingkat parah.

Keterangan: Program tersedia di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Bentuk kecanduan judi online

- 1 Melakukan judi berulang.
- 2 Selalu gagal dalam upaya berhenti judi.
- 3 Mengalami gangguan pola tidur, makan dan perilaku.
- 4 Menggunakan uang semakin banyak untuk berjudi.
- 5 Gelisah dan mudah tersinggung saat berusaha berhenti judi.

Layanan informasi



Hotline Kementerian Kesehatan

1500-567



SMS

081281562620



Email

kontak@kemkes.go.id



Sultan Ajak Pemuda Membangun Daerah





Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berfoto bersama peserta *talkshow* Kolaborasi DPD RI dan BPD HIPMI Bengkulu, di Bengkulu, Sabtu (16/11/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengajak generasi muda Indonesia, khususnya di Bengkulu agar terus bersatu dan berkolaborasi untuk membangun masa depan daerah sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebab, generasi muda merupakan aktor utama dalam penggerak pembangunan Indonesia ke depan.

“Pemuda adalah aktor utama pembangunan. Bonus demografi yang kita hadapi pada 2045, dengan 70% penduduk usia produktif, adalah peluang sekaligus tantangan. Tugas kita memastikan generasi ini siap menjadi pelaku produktif, bukan hanya penonton,” tegas Sultan dalam *talkshow* kolaborasi DPD RI

dan BPD HIPMI Bengkulu, di Bengkulu, Sabtu (16/11/2024).

Sultan mengajak generasi muda untuk bersikap inklusif dan saling mendukung dalam membangun daerah agar lebih maju. Ia juga mengingatkan peserta untuk memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu dia menekankan pentingnya membangun jaringan yang kuat untuk menghadapi peluang dan tantangan global.

“DPD RI berkomitmen menjadi lembaga inklusif dan kolaboratif. Kita, sebagai anak muda Bengkulu, juga harus bergotong royong, membangun jaringan, dan berani menghadapi peluang maupun tantangan. Kita tidak hanya membangun Bengkulu untuk sekarang, tapi untuk masa depan. De-

ngan kolaborasi, Bengkulu akan menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Kita akan menjadikan Bengkulu sebagai pilar penting Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sultan.

Selain memberi motivasi kepada generasi muda untuk terus produktif dan berkembang, Sultan juga berbagi pengalaman hidup yang penuh tantangan hingga berhasil mencapai posisi strategis di usia muda. Sultan mengisahkan dirinya belajar dari setiap kegagalan dan kemenangan. Kuncinya adalah komitmen, konsistensi, dan keberanian mencoba hal baru. Jangan takut gagal, karena di situlah yang menemukan kekuatan untuk berkembang. (*)

***Fun Walk Green Democracy* Sebagai Wujud Kepedulian untuk Lingkungan**

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan

B Najamudin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga lingkungan dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan melalui kegiatan *Fun Walk Green Democracy* yang digelar di depan GOR Sawah, Bengkulu, Minggu (17/11/2024).

Di hadapan ribuan masyarakat yang hadir, Sultan menyampaikan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang. “Kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menerapkan prinsip demokrasi hijau yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga soal peduli lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Sultan penuh semangat.

Sultan juga menyatakan rasa syukurnya atas dukungan masyarakat Bengkulu yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karier politiknya.

“Saya pulang ke Bengkulu kali ini dengan perasaan berbeda. Amanah sebagai Ketua DPD RI adalah tanggung jawab besar yang tidak



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama peserta *Fun Walk Green Democracy*. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat Bengkulu. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya ingin berbagi rasa syukur ini dengan kalian semua,” ungkap Sultan yang kini memimpin DPD RI untuk periode 2024-2029 ini.

Sultan menaruh harapan besar untuk masa depan Bengkulu. Dirinya berharap agar Bengkulu terus melahirkan pemimpin-pemimpin daerah dan nasional yang potensial. Dengan posisi strategis yang kita miliki saat ini sebagai Ketua DPD RI, Sultan yakin Bengkulu akan semakin maju dan

menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Acara *Fun Walk Green Democracy* dengan rute sejauh 5 kilometer bersama Rian D’Masiv sebagai pengisi acara, menjadi ajang yang diikuti oleh masyarakat lintas generasi, mulai dari pelajar, komunitas olahraga, hingga keluarga. Acara ini turut dihadiri oleh tiga senator Bengkulu, yaitu Leni Haryati John Latief, Destita Khairilisani, dan Elisa Ernasari. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Bengkulu yang lebih baik. (*)

Integrasikan Transmigrasi dengan Program *Food Estate*

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyarankan kepada pemerintah agar mengintegrasikan program transmigrasi dengan program *food estate* dalam mengurai persoalan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini. Program transmigrasi harus didasarkan pada kebutuhan industri dalam pengembangan kawasan industri.

“Transmigrasi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat rasa persatuan di daerah. Namun kita ingin program ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri pangan di suatu daerah,” kata Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (14/11/2024).

Dengan prinsip pengembangan wilayah seperti kawasan industri, penempatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi *agent of technological innovation* bagi masyarakat lokal sehingga proses alih teknologi dapat berlangsung dengan baik. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetak-

an kawasan industri pertanian dan perikanan di daerah yang secara kewilayahan dan jumlah penduduk masih sangat timpang. Dengan kata lain pemerintah harus mematangkan perencanaan distribusi SDM agar sesuai dengan kebutuhan dalam swasembada pangan.

Oleh karena itu, kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, program distribusi SDM atau transmigrasi tersebut perlu diintegrasikan dengan program *food estate* atau program swasembada pangan lainnya dalam pengembangan kawasan industri pangan secara inklusif. “Program distribusi SDM harus diikuti dengan pendekatan introduksi teknologi. Sehingga SDM yang dikirim ke daerah kawasan industri sebaiknya adalah tenaga terampil yang siap mengeksplorasi potensi SDA secara efisien dan berkelanjutan,” saran-

nya.

Ketua DPD RI ke-6 itu mengingatkan pemerintah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam mewujudkan program transmigrasi yang harmonis. Tentunya dengan melakukan pendekatan sosial budaya dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat sebelum memobilisasi transmigran ke daerah terkait.

“DPD RI siap melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung program transmigrasi di daerah. Jangan sampai ada penolakan yang berujung pada konflik sosial,” kata senator dari daerah pemilihan Bengkulu itu. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

40 Kecamatan di Sumut Belum Memiliki Sekolah



Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni. (Foto: Diskominfo Sumut)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pdt. Penrad Siagian mengatakan bahwa saat ini terdapat tantangan yang masih dihadapi masyarakat Sumatra Utara (Sumut), termasuk persoalan pemerataan pendidikan di tingkat kecamatan. Saat ini masih ada sekitar 40 kecamatan di Sumut yang belum memiliki sekolah.

“Pemerintah Provinsi Sumatra Utara perlu segera merealisasikan rencana pembangunan sekolah terbuka agar akses pendidikan merata,” ujar Penrad yang menyampaikan hasil pertemuannya dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni, di Kantor Gubernur Sumut baru-baru ini.

Dalam keterangannya, Senin (18/11/2024), Penrad juga menyoroti tingginya angka anak putus sekolah di Sumut. Berdasarkan data statistik pendidikan Kemendikbudristek tahun 2023, kumulatif nasional anak putus sekolah tingkat



sekolah dasar (SD) sebanyak 40.623 anak dan tingkat SMP sebanyak 13.716 anak. Sumut menempati posisi kedua terbanyak anak putus sekolah dengan jumlah 7.600 anak. Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten/kota terbanyak anak putus sekolah tingkat SD/SMP.

Dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Sumut itu, mereka juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, pemekaran daerah, dana bagi hasil, kekerasan seksual dan anak, konflik agraria, stunting, serta tenaga kerja luar negeri.

Penrad juga menyoroti tantangan lain di sektor kesehatan, seperti kurangnya tenaga spesialis di beberapa rumah sakit, termasuk spesialis anak, bedah, dan penyakit

dalam. Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumut perlu memastikan setiap rumah sakit, terutama di Pulau Nias, memiliki laboratorium yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Dia juga mencatat Sumatra Utara sebagai salah satu provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Hampir 70 persen kasus melibatkan anak-anak, terutama kekerasan seksual. Penrad meminta Pemerintah Provinsi Sumut perlu melakukan langkah konkret untuk mengurangi angka kekerasan.

Terkait konflik agraria, dia meminta perlu dipahami latar belakangnya, dan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Penrad menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi secara aktif

dalam mempercepat penyelesaian permasalahan di Sumut, dalam menghadapi tantangan daerah sekaligus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Agus Fatoni menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pembangunan sekolah terbuka telah disusun dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, sejak penetapan dirinya sebagai Pj Gubernur Sumut, pembahasan mengenai eks-HGU seluas 3.000 hektare yang belum selesai masih ditunda hingga gubernur definitif dilantik.

(*)





Momen Peringatan HGN 2024 Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, momen peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 harus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memprioritaskan guru sebagai pilar utama pendidikan. Guru adalah tiang kokoh dalam bangunan pendidikan Indonesia. Ketika peran, kompetensi dan kesejahteraan guru ditingkatkan, maka pendidikan yang bermutu akan dirasakan semua peserta didik.

Peran guru sebagai penggerak perubahan bangsa dapat dikuatkan melalui lima strategi. *Pertama*, peningkatan kesejahteraan guru. *Kedua*, pelatihan dan pendidikan lanjutan. *Ketiga*, pengurangan beban administrasi. *Keempat*, kepastian jalur karier, dan *kelima*, dukungan untuk guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jika strategi tersebut dijalankan secara maksimal dan beriringan, maka kemajuan sektor pendidikan akan segera diraih.

“Peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya mencakup kenaikan gaji, tetapi juga tunjangan, fasilitas kerja, dan jaminan sosial. Sistem penghargaan berbasis kinerja dapat menjadi



Faira Idris. (Foto/dok pribadi)

insentif bagi guru untuk terus berinovasi dalam pengajaran,” kata anggota dari DKI Jakarta ini, Senin (25/11/2024).

Selain itu, pengurangan beban administrasi yang menguras waktu dan energi juga merupakan strategi menguatkan peran guru dalam mempercepat kemajuan pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi dan membangun sistem data pendidikan yang terintegrasi, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka yaitu mengajar dan mendampingi siswa.

Fahira mengungkapkan bahwa guru membutuhkan kepastian jalur karier yang transparan dan berbasis meritokrasi. Pilihan jalur

karier seperti kepemimpinan sekolah, spesialis kurikulum, atau pengajaran memungkinkan para guru untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan kemampuan.

Sementara itu, pemerintah harus memastikan kesejahteraan dengan memberikan tunjangan khusus, insentif, dan fasilitas pendukung agar tantangan besar yang dihadapi para guru yang mengabdikan diri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar ini bisa teratasi. “Dengan guru yang sejahtera dan kompeten, Indonesia dapat bergerak maju, mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Fahira. (*)

GKR Hemas Ajak Media Awasi Kinerja DPD RI

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja DPD RI. Sikap kritis dan konstruktif dari awak media dalam memberikan masukan diperlukan, agar DPD RI dapat bekerja secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai pada masyarakat di seluruh penjuru negeri,” ujar GKR Hemas dalam Forum Silaturahmi DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Yogyakarta, Jumat (22/11/2024).

GKR Hemas mengatakan bahwa DPD RI periode 2024-2029 memiliki struktur kepemimpinan dan anggota yang siap bekerja secara progresif untuk mendorong berbagai aspirasi dari daerah.

Oleh karena itu, sinergi antara DPD RI dan awak media sangat dibutuhkan agar kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.

Dikatakan Ratu Hemas, DPD RI pada periode ini harus menunjukkan kemampuan yang lebih besar dari anggota dan pimpinan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena, DPD RI pada periode ini harus punya kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh anggota DPD RI dan juga oleh pimpinan DPD RI untuk bekerja lebih banyak lagi.

“Khususnya, untuk kami-kami ini yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” tambahnya.

GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, media massa sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hasil kinerja serta membantu DPD RI dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah, namun kami tidak dapat bekerja sendiri,” kata senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (*)

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Wartawan



Dari kiri Plh Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Tamsil Linrung, serta Ketua KWP Ariawan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan lembaga yang dipimpinnya membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan, penyebarluasan informasi atas capaian kerja kepada masyarakat luas. Pemberitaan yang dibutuhkan adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, validitas data tinggi dan menjangkau pembaca yang luas.

“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolabo-

rasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI ke depan,” ucap Sultan dalam Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dengan Media bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Yogyakarta, Jumat (22/11/24).

Pimpinan DPD RI masa ini, sambungnya, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, Pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

Senator asal Bengkulu ini juga menilai kegiatan informasi menjadi vital dalam



SYUKURAN DI KERATON: Selain diskusi tentang kolaborasi DPD RI dengan wartawan, DPD RI juga menggelar acara syukuran kepemimpinan baru DPD RI di Keraton Yogyakarta yang dihadiri langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: Biro PHM DPD RI)

era modern saat ini. Namun kecepatan arus informasi tentunya perlu dijaga kadar kualitas, segmentasi berita, narasi yang dibangun hingga visualisasi pemberitaan yang menarik. Untuk memenuhi hal itu dibutuhkan SDM yang kompeten dan *up to date* atas perkembangan dunia jurnalisme.

Sementara itu, Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir menjelaskan memasuki fase penting menuju Indonesia Emas 2045, percepatan pembangunan daerah menjadi salah satu agenda utama yang ingin diwujudkan oleh DPD RI. Untuk itu, DPD RI terus memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan

lainnya, termasuk rekan-rekan wartawan sebagai mitra strategis.

“Media juga memiliki peran sangat penting dalam membangun jembatan antara DPD RI dan masyarakat. Melalui penyebaran berita, sosialisasi kinerja, serta komunikasi yang informatif, media mampu menciptakan opini publik yang positif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI,” kata Lalu Niqman Zahir.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan memberikan apresiasi kepada Pimpinan DPD RI dan Ketua Alat Kelengkapan DPD RI karena hadir di forum ini

secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dibawah kepemimpinan Sultan B Najamudin sangat kompak. “Kita apresiasi setinggi tingginya untuk Pimpinan DPD RI karena dibawah kepemimpinan Pak Sultan sangat solid,” imbuhnya.

Ariawan menambahkan bahwa Ketua DPD RI sangat terbuka dengan rekan-rekan media. Hal ini memudahkan teman-teman jurnalis untuk menggali isu-isu yang baru. “Pak Sultan sangat terbuka dengan wartawan sehingga kami sangat mudah mewawancarai beliau. Ini yang dibutuhkan DPD RI karena menyambung suara daerah,” tuturnya. (*)

Keterbatasan SDM Jadi Masalah Tata Kelola Pemerintahan Desa

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah ahli dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komite Peman-tauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Rabu (20/11/2024). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata kelola pemerintahan desa.

“Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal krusial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada empat aspek permasalahan yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, kebijakan, yaitu desa yang kurang produktif dalam menyusun peraturan desa, serta kelemahan di mana peran BPD belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow saat memimpin rapat.

Direktur Eksekutif KP-POD, Herman Suparman, menjelaskan sketsa masalah keterbatasan tata kelola desa masih seputar keterbatasan SDM, kesenjangan sosial, infrastruktur, dan ekonomi di mana desa hanya bergan-



Pimpinan BULD DPD RI saat RDPU bersama APDESI dan KPPOD. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tung kepada dana desa. Padahal, desentralisasi fiskal pada UU Desa memungkinkan setiap desa menerima pendapatan asli desa di luar dana desa yang diterima dari pemerintah. Menurut Herman, dibutuhkan kolaborasi tata kelola desa dengan seluruh perangkat desa, masyarakat, dan tentunya pemerintah pusat.

“Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada kualitas *good governance*. Sudah satu dekade kita menerapkan UU Desa, namun apakah ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan sudah tercapai? Perlunya peningkatan kualitas tata kelola desa agar dapat mengubah desa menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan dari pemerin-

tahan yang lebih tinggi,” ucap Herman.

Senada dengan Herman, Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya, menyatakan bahwa mendukung tata kelola desa yang efektif sangat penting untuk melakukan evaluasi maupun rekrutmen ulang perangkat desa sesuai kebutuhan desa.

“Peningkatan kualitas SDM bagi kepala desa maupun perangkat desa harus rasional dan kondisional. Misalnya, persyaratan pendidikan minimal untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah yang tingkat pendidikannya sudah merata. Atas semua permasalahan di desa mengenai tata kelola, kami berharap DPD RI dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa,” ujarnya. (*)

Banyak BUMDes Mati Suri

Banyak Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan, ada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang menyatakan bahwa banyak BUMDes dalam kondisi mati suri.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan sejumlah ahli dari Asosiasi Pemerintah Desa

(BUMDes) yang kondisinya saat ini seperti mati suri. Dari hasil temuannya saat reses, banyak BUMDes yang hampir tidak memberikan dampak ekonomis bagi desa sehingga perlu peran serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk menghidupkannya kembali.

Senator asal Bali, Ni Luh Djelantik, menilai, BUMDes sebagai ujung tombak desa jika tidak dikelola secara profesional akan menjadi bumerang karena rentan menimbulkan

terus-menerus bergantung pada dana desa,” katanya.

Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, turut prihatin atas tata kelola desa yang seringkali dipolitisasi oleh oknum tertentu. Banyak desa tertinggal, terutama di pulau-pulau kecil, yang dianaktirikan sehingga sulit untuk mendapat bantuan dan perhatian pemerintah pusat dan daerah dikarenakan penduduk desa tersebut tidak memilih calon pemimpin daerah atau



Pimpinan dan anggota BULD usai RDPU bersama APDESI dan KPOD. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD), Rabu (20/11/2024).

Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti kemandirian finansial desa. Dia menyayangkan banyak Badan Usaha Milik Desa

nepotisme di lini pengelola BUMDes. Seringkali pengelola BUMDes merupakan kerabat dari kepala desa yang belum tentu kompeten dan paham akan cara mengelola BUMDes.

“Seharusnya kepala desa mengupayakan pengelolaan BUMDes seperti mengelola perusahaan yang berfokus pada keuntungan BUMDes yang tentunya berdampak pada pendapatan dan kemandirian desa, sehingga tidak

legislatif pemenang Pemilu. “Permasalahan ini harus segera dibicarakan serius dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tuturnya.

Pandangan dan pendapat serupa juga datang dari Anggota BULD DPD RI Hasby Jusuf (Maluku Utara), Sularso (Papua Selatan), Darmansyah Husein (Bangka Belitung), dan Jelita Donal (Sumatera Barat). (*)

Pengawasan UU Pangan, Komite II Kunker ke DIY



Rombongan Komite II DPD RI saat meninjau gudang Bulog Kanwil Yogyakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (23/11/2024), dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Pangan).

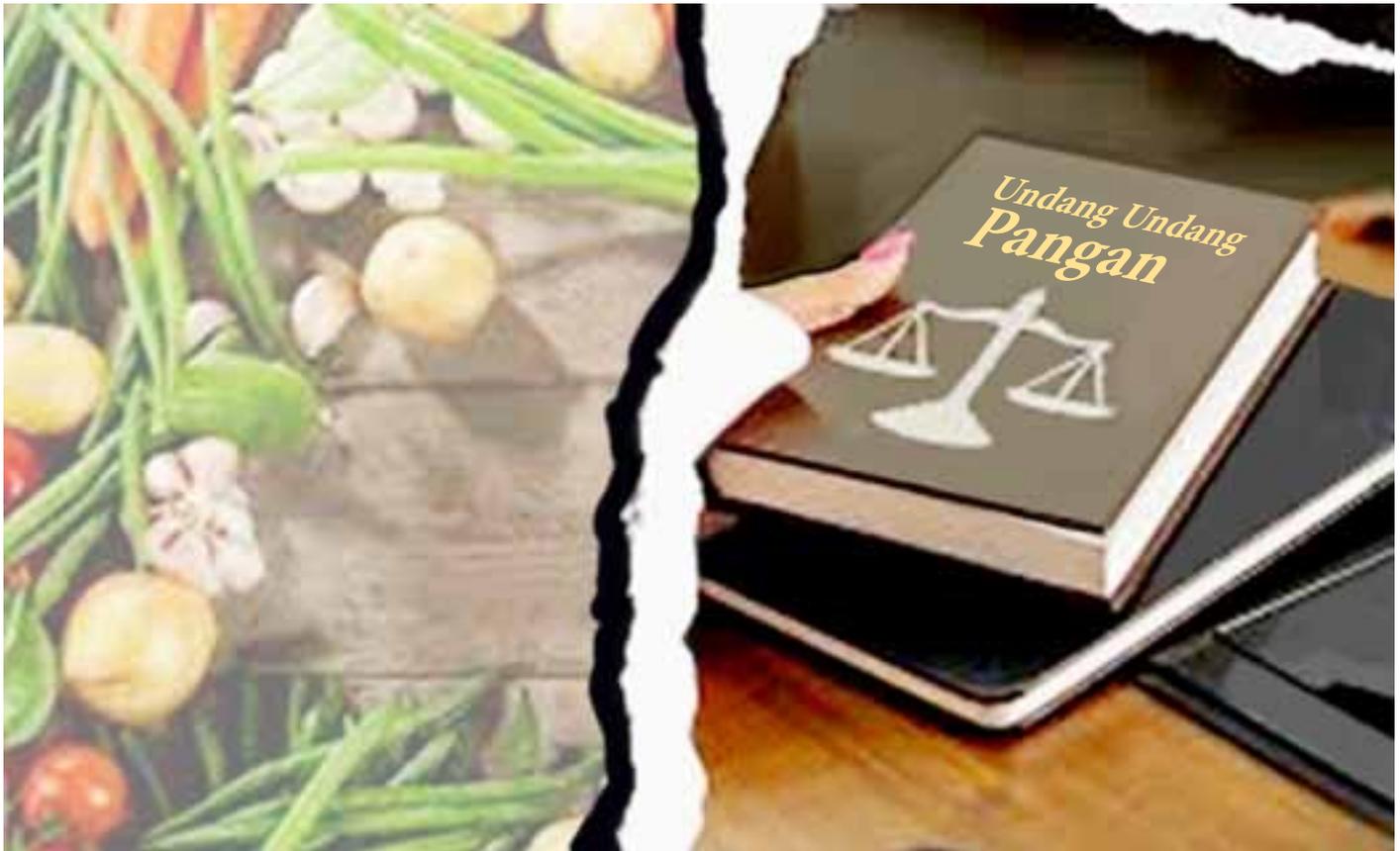
Dalam kunjungan kerja (kunker) itu, Komite II DPD RI melakukan perte-

munan dengan Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi DIY beserta jajarannya, pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya, di Kantor DPD RI Provinsi Yogyakarta.

“Komite II memilih kunjungan kerja di provinsi ini karena Yogyakarta memiliki kekayaan sumber daya pangan lokal, mulai dari hasil pertanian seperti padi, jagung, dan singkong hingga komoditas perkebu-

nan seperti kopi, kakao, dan kelapa. Selain itu, Yogyakarta terkenal dengan makanan tradisionalnya seperti gudeg, yang menunjukkan inovasi dalam memanfaatkan bahan pangan lokal,” kata Ketua Komite II, Badikenita Putri Br. Sitepu.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi DIY, Hery Sulistio Hermawan, menyampaikan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan pekarangan dalam rangka penyiapan nutrisi pangan masyarakat. Dengan de-



mikian, kebutuhan pangan masyarakat bisa disiapkan secara optimal.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, menyampaikan bahwa program bantuan pangan efektif meningkatkan penyebaran beras di masyarakat karena penyalurannya berbasis BNBA (Bantuan Beras Bulog) sehingga perlu dipertimbangkan penyaluran setahun penuh untuk menjaga stabilisasi harga. Total realisasi penyaluran bantuan pangan Kanwil Yogyakarta tahun 2024 sebesar 129.165 ton atau mencapai 88,89%.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, menyampaikan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggara-

raan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perencanaan pangan diwujudkan dalam bentuk rencana pangan yang ditetapkan oleh presiden atau kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto, menyampaikan bahwa sampai dengan 22 November 2024, harga barang kebutuhan pokok cenderung stabil seperti beras, gula, minyak goreng baik curah, premium maupun Minyakita, daging sapi, daging ayam

ras, kedelai, tepung terigu, dan bawang putih. Hanya komoditas bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp 41.000/kg atau naik 28,04% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan harga tersebut karena adanya penurunan pasokan di sentra produksi seperti Demak, Tegal, dan Brebes.

Pada kesempatan tersebut, kementerian/lembaga menyampaikan komitmen untuk berkolaborasi dengan Komite II DPD RI dalam rangka menjembatani kepentingan dan aspirasi daerah dengan Pusat. Setelah diskusi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke gudang Bulog untuk meninjau langsung kondisi stok pangan, khususnya beras, di Kanwil Yogyakarta. (*)

Penjabat Gubernur Lampung Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI



Anggota DPD RI dapil Lampung bersama Pj. Gubernur Lampung Samsudin. (Foto Pemprov Lampung)

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (26/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong pembangunan Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, mengajak para senator yang hadir—Abdul Hakim (Komite I), Bustami Zainudin (Komite II), dan Ahmad Bastian SY (Komite III)—untuk bergandengan tangan memajukan

pembangunan Lampung.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan dukungan kuat dari DPD RI, DPR RI, serta kementerian dan lembaga pusat untuk mengoptimalkan pembangunan di Lampung. Samsudin mencatat bahwa banyak pejabat eksekutif, legislatif, dan struktural di tingkat pusat berasal dari Lampung dan memiliki komitmen untuk memajukan kampung halaman mereka, Sai Bumi Ruwa Jurai. “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Banyak potensi yang harus kita satukan untuk kepentingan bersama,” katanya.

Samsudin mengapresiasi atas gagasan konsolidasi yang

disampaikan oleh para anggota DPD RI untuk menyinergikan peran semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, demi memaksimalkan potensi Lampung.

Sementara itu, anggota Komite III DPD RI Ahmad Bastian SY, mengungkapkan bahwa Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis yang dekat dengan Jakarta, menjadikannya sebagai salah satu penopang konsumsi pangan ibu kota. “Sektor pangan Lampung melimpah. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus menyambut program-program pusat agar bisa diimplementasikan di daerah kita,” ujar Bastian. (*)

Pegawai Setjen DPD RI Ikuti Bimtek Jurnalistik

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin terus berupaya meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya melalui publikasi pemberitaan media massa dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalisme untuk para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI.

“Setiap lembaga pasti membutuhkan publikasi yang baik dan cepat untuk melakukan sosialisasi atas kinerja lembaganya kepada masyarakat. Apalagi DPD RI sebagai lembaga politik, tentunya membutuhkan opini publik yang baik untuk mendengarkan aspirasi, merespon masalah, mendeliver isi dan pesan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan citra positif lembaga ini,” kata Sultan pada pembukaan Bimtek Jurnalisme itu, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Senator asal Bengkulu tersebut berharap setelah digelarnya Bimtek Jurnalisme ini, kemampuan pegawai DPD RI di bidang jurnalistik ikut bertambah sehingga mampu meningkatkan citra lembaga melalui rilis berita maupun konten sosial media yang dibuat. Sultan juga memotivasi para pegawai DPD RI agar tidak lelah belajar dan *update* dengan perkembangan teknologi informasi.

“Agar tidak tertinggal kita



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Plh Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin dan narasumber Bambang Jatmiko. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tidak boleh lelah belajar, karena perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Jika kita tidak memiliki komitmen dan konsistensi untuk belajar tentunya kita akan terus ketinggalan. Saya juga berharap seluruh elemen DPD RI, terutama teman-teman di Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) DPD RI agar berkolaborasi dalam menciptakan komunikasi efektif dengan masyarakat sehingga lembaga kita dapat lebih dikenal,” pesan Sultan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir menyatakan, tanpa publikasi yang baik, masyarakat tidak akan tahu seberapa keras kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. “Peran kita di sekretariat DPD RI tidak hanya mendukung tugas konstitusional DPD RI, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan ke-

percayaan masyarakat kepada lembaga,” kata Lalu.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Redaktur Pelaksana kompas.com Bambang Jatmiko memaparkan langkah-langkah pembuatan berita yang menarik. Langkah pertama adalah rutin melakukan pengecekan tren judul atau kata kunci yang sedang diminati masyarakat. Tren pembaca saat ini bergeser bukan lagi soal berita bad news.

“Pembaca saat ini menyukai berita positif yang dianggap memberi harapan, seperti berita-berita pemberdayaan masyarakat, berita sosial, politik maupun kebijakan pemerintahan. Antusiasme masyarakat yang mulai tinggi terhadap berita positif baik di bidang politik maupun pemerintahan ini sebaiknya dimanfaatkan oleh pegawai lembaga pemerintah untuk membuat berita yang menarik bagi masyarakat,” jelasnya. (*)



PRESS GATHERING DPD RI – KWP: Selama tiga hari di Yogyakarta (22-24/22/2024), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan *Press Gathering* dengan wartawan parlemen yang bernaung di bawah Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP). Acara dimulai dengan forum diskusi bertajuk: "Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045" yang dibuka Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



POTONG TUMPENG DI KERATON: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin bersama dua Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Tamsil Linrung melakukan potong tumpeng di Keraton Yogyakarta, Sabtu (23/11/2024). Pemetongan tumpeng ini adalah sebagai wujud syukur atas keterpilihan kepemimpinan baru DPD RI periode 2024-2029 yang dikomandoi Sultan B Najamudin dengan tiga wakil ketua: GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

OUTBOND WARTAWAN: Dalam acara *Press Gathering* Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP) bersama jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Yogyakarta, juga diselenggarakan *outbond* dan diskusi di Al Azhar Yogyakarta World Schools. Sejumlah wartawan yang biasa meliput di parlemen foto bersama dengan jajaran Bagian Pemberitaan DPD RI) se usai mengikuti *outbond*, Sabtu (23/11/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



ATENSI DAN INISIASI DPD RI DALAM MENDORONG LAHIRNYA UU PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM

Oleh:

Sultan Baktiar Najamudin/Ketua DPD RI

Amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan bahan bakar fosil berdampak negatif pada lingkungan dan memperburuk perubahan iklim, yang mana pada akhirnya tidak memberikan kemakmuran pada rakyat. Pasal 33 memberikan landasan hukum bagi negara untuk berperan aktif dalam penanggulangan perubahan iklim, terutama dalam regulasi dan kebijakan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan rakyat saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa manusia diyakini tanpa keraguan menjadi penyebab perubahan iklim, dengan ditandai peningkatan suhu global yang cukup signifikan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau, menjadi negara yang sangat rentan akan dampak



buruk dari perubahan iklim. Dampak buruk yang dimaksud merupakan perubahan jangka panjang (*slow onset events*), seperti kenaikan air laut, perubahan pola air hujan, dan suhu yang meningkat, serta peristiwa ekstrem akibat perubahan cuaca (*extreme weather events*), seperti banjir kepanjangan dan kekeringan. Dalam rentang tahun 2013 hingga 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim di Indonesia sebanyak 28.471, sehingga mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, lebih dari 3,5 juta orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

Berdasarkan ND-GAIN Country Index, yakni studi yang berusaha untuk melihat kesiapan negara dalam menghadapi perubahan

iklim, Indonesia berada pada peringkat 98 dari 181 negara. Peringkat tersebut menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi, tetapi belum cukup siap dalam menghadapinya. Apabila dihitung dari kerugian ekonomi, perubahan iklim diestimasikan menimbulkan kerugian sebesar 3,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030 atau setara Rp 2.380 triliun.

Perubahan iklim merupakan isu kemanusiaan yang perlu ditangani secara bersama-sama (*common concern of humankind*). Tetapi di sisi lain, perubahan iklim menerapkan prinsip *common but differentiated responsibilities* atau tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda. Pertimbangannya adalah bahwa pihak yang paling terkena dampak negatif perubahan iklim, kerap kali bukanlah kontributor utama penyebab timbulnya perubahan iklim. Maka dari itu, didorong sebuah konsep yang disebut sebagai keadilan iklim. Pasal 33 juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial, di mana Negara harus memastikan bahwa dampak perubahan iklim tidak memperburuk kemiskinan dan



ketimpangan sosial. Kebijakan adaptasi iklim harus memperhatikan komunitas rentan yang bergantung pada sumber daya alam, karena lebih mungkin mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, dan tidak mempunyai akses memadai untuk menghadapi dan pulih dari hal itu.

Pada dasarnya di Indonesia telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan upaya mitigasi penanganan perubahan iklim. Tetapi, peraturan yang ada tidak cukup berdayaguna dan berhasil-guna sehingga tidak banyak menunjukkan dampak signifikan. Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa alasan utama pentingnya pembentukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, yaitu *pertama*, kebutuhan regulasi pokok supaya arah kebijakan, pembangunan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan iklim secara sinergis dan menghindari tumpang tindih kebijakan sektoral; *kedua*, kebutuhan regulasi yang mampu mengangkat, mengkonsiderasikan aspek ketimpangan akses, serta memberikan tindakan afirmatif kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim; *ketiga*, kebutuhan menguatkan agenda perubahan iklim yang sudah dicanangkan dan dimuat dalam berbagai dokumen

negara, perencanaan dan inisiatif, seperti NDC, RPJMN, dan SDGs, supaya dapat diterapkan dalam seluruh aspek perencanaan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa; *keempat*, kebutuhan adanya peta jalan dalam jangka panjang yang mampu menentukan skala prioritas pengendalian perubahan iklim, yang mampu mengintegrasikan adaptasi, mitigasi, dan *loss and damage* dengan mempertimbangkan target dan sumber daya yang tersedia; *kelima*, menciptakan komitmen dan fondasi yang kuat untuk mendorong adanya implementasi dan penegakan rencana pengendalian perubahan iklim, yang didukung dengan anggaran yang mumpuni, di berbagai tingkatan dan sektor (*lead the ambitions to be achievable*); *keenam*, kebutuhan regulasi yang mampu memberikan dasar untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sesuai dengan target dan perencanaan yang sesuai dengan peta jalan yang dirumuskan; *ketujuh*, menciptakan tata kelola iklim (*climate governance*) yang kuat dan jelas supaya mampu menginstitutionalisasi upaya pengendalian iklim dan pengarusutamaan keadilan iklim baik di tingkat nasional maupun daerah serta memperkuat peran Indonesia dalam upaya pengelolaan perubahan iklim di panggung dunia; *kedelapan*, Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Rencana ini harus selaras dengan kebijakan nasional, seperti Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK). Daerah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan program-program mitigasi, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, efisiensi energi, serta konservasi hutan dan lahan gambut. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong penggunaan energi terbarukan di tingkat lokal; *kesembilan*, Pengaturan Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan aspek perubahan iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk zona hijau, daerah resapan air, dan perlindungan kawasan pesisir. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang diperparah oleh perubahan iklim. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan perubahan iklim, termasuk pengawasan terhadap izin tambang, kehutanan, dan penggunaan lahan.

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini

menjadi penting karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait pengendalian perubahan iklim masih tersebar di berbagai peraturan, belum terintegrasi dan harmoni antara kebijakan pemerintah nasional dan daerah. Tidak hanya itu, saat ini regulasi yang ada kerap diatur dalam tataran Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, sehingga dibutuhkan regulasi dengan basis yang lebih kuat untuk menjawab tantangan yang ada. Pengaturan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sangat diperlukan sebagai jawaban atas perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, serta telah menyusun dokumen *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*, menuju *net-zero emission* dengan tetap memper-

timbang kondisi ekonomi bertumbuh, ketahanan iklim, dan berkeadilan. Namun, skala krisis iklim yang telah mencapai titik didih saat ini memaksa semua negara untuk menetapkan arah kebijakan iklim yang komprehensif dan inklusif.



Tentunya dengan pendekatan hukum dan pembiayaan yang lebih memadai.

Hal ini sejalan dengan visi besar yang diusung oleh komitmen Pemerintah Presiden Prabowo dalam penanganan perubahan iklim yang tergambar dalam Asta Cita program kerja Prabowo-Gibran (asta cita nomor 2 dan 8), yakni, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong ke-

mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Serta, memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Mengingat bahwa isu perubahan iklim merupakan skala isu yang bersifat global, regional, nasional dan lokal serta lintas sektoral dan sangat mendesak, semoga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dan ditetapkan dalam pembahasan tripartit (DPR RI, DPD RI dan Pemerintah) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, di-

mana DPD RI selaku inisiatif dan sudah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang berdasarkan kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, semoga segera dilakukan pembahasan dan menjadi Undang-Undang untuk menjamin keselamatan bumi dan makhluk hidup serta kepentingan dan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. (*)



Empat 'Surga' Tersembunyi di Banda Naira

Four Hidden Heaven in Banda Naira

1 Benteng Belgica / Belgica Fort

Mengunjungi Benteng Belgica seperti melangkah kembali ke masa lalu. Benteng ini merupakan salah satu monumen sejarah yang paling ikonik di Banda Naira, dibangun oleh kolonial Belanda pada abad ke-17 sebagai benteng pertahanan. Benteng ini menawarkan pemandangan panoramika pelabuhan Banda dan lautan luas, sempurna untuk menghabiskan sore hari sambil menyaksikan matahari terbenam.



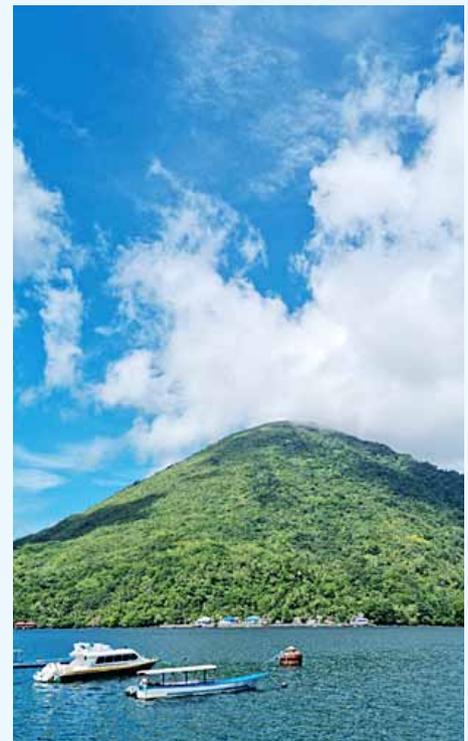
(Foto Liputan6.com)

Visiting Belgica Fort is like taking a journey to the past. The fort is one of the most iconic historical monuments in Banda Naira which was built by the Dutch Colonial in the 17th century as a battle fort. It offers a panoramic view of Banda Seaport and the wide-open sea, perfectly suitable to spend the afternoon while awaiting for the sunset.

2 Gunung Api Banda / Banda Volcanic Mountain

Bagi para pencinta alam dan petualang, pendakian ke puncak Gunung Api Banda adalah kegiatan yang tidak boleh dilewatkan. Gunung berapi ini masih aktif dan menawarkan jalur pendakian yang menantang dengan pemandangan yang memukau. Dari puncak gunung, pengunjung bisa menikmati pemandangan 360 derajat dari seluruh kepulauan Banda, termasuk jajaran gunung berapi dan perairan biru kristal yang mengelilingi pulau.

To environmentalists and adventurers, hiking to the peak of Banda volcanic mountain is an inescapable activity. Still being an active volcano, the mountain offers a challenging hiking route with enchanting scenic view. From its peak can visitors enjoy 3600 scenery all around Banda archipelago, including stretch of volcanic mountains and blueish crystal water surrounding the island.



(Foto Atourin.Com)

3

Rumah Budaya Banda Naira / Banda Naira Culture House

Rumah Budaya Banda Naira adalah tempat yang sempurna untuk menyelami kekayaan budaya lokal. Museum ini menyimpan berbagai artefak sejarah, seni, dan kerajinan tangan dari Kepulauan Banda dan sekitarnya. Pengunjung dapat belajar tentang sejarah perdagangan rempah-rempah yang pernah membuat kepulauan ini sangat berharga dan diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa.



(Foto Atourin.com)

Banda Naira Culture House is a perfect place to plunge into local cultural wealth. The museum keeps various historical artefacts, arts, and art crafts from the island and its surrounding. Visitors can learn about spice trading which had ever made the archipelago highly valuable, contested by many European nations.

4

Pantai Pulau Hatta / Hatta Isle Beach

Pulau Hatta, yang terletak tak jauh dari Banda Naira, memiliki salah satu pantai terindah dengan pasir putih dan air laut yang jernih kebiruan. Pantai ini merupakan destinasi sempurna untuk snorkeling, dengan terumbu karang yang sehat dan beragam kehidupan laut. Pengunjung bisa menghabiskan hari mereka dengan berenang, *snorkeling*, atau sekedar bersantai di bawah sinar matahari tropis, sambil menikmati keindahan alam yang belum terjamah.



(Foto Atourin.com)

Hatta isle, in close distance from Banda Naira, possesses one of the most beautiful beaches with its white sand and blueish crystal water. The beach is a perfect destination for snorkeling within its healthy coral reef and variety of marine lives. Visitors can spend the day swimming, snorkeling, or just relaxingly sun-bathing under the tropical sun while enjoying the scenic original nature.



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Selamat Memperingati Hari

BELA NEGARA



19 Desember 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

